



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIEF TYAHYONO
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 731524

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.715.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.065 m2/580 m2 di KAB / KOTA JEMBER, Rp. 3.050.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 41 m2/41 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 19 m2/19 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 465.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 146 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 440.000.000

1. MOTOR, VESPA PRIMERA IGET 150 ABS A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 292.193.464

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.447.193.464

III. HUTANG Rp. 135.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.312.193.464



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.